



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta 10310  
Telepon (+6221) 31936207, 3905650; Faksimile (+6221) 3145374  
[www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)

---

Nomor : B-13448/P.01/DL.03.01/07/2023 Jakarta, 18 Juli 2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : Lima berkas  
Hal : Pemanggilan Calon Peserta Pelatihan  
Fungsional Perencana Ahli Pertama Tahun 2023

Yth.

1. Kepala Biro Kepegawaian/Sumber Daya Manusia Kementerian/Lembaga
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

Menindaklanjuti surat kami Nomor B-06347/P.01/DL.03.01/03/2023 tanggal 12 April 2023 perihal Penawaran Program Pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama, bersama ini disampaikan bahwa Staf Saudara, sebagaimana daftar terlampir, telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama akan dilaksanakan secara daring pada 24 Juli hingga 8 September 2023 oleh Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada.
2. Selama pelaksanaan Program Pelatihan Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas tersebut, peserta diwajibkan untuk selalu menyalakan video selama proses pelatihan berlangsung dengan tingkat kehadiran minimal 90 persen. Satu sesi = 2 jam pelajaran (jampel), dengan masing-masing jampel berdurasi 45 menit
3. Pemberian sertifikat kelulusan kepada peserta harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a). Memenuhi tingkat kehadiran sebagaimana disebutkan pada poin 2; b). Memenuhi nilai minimum evaluasi pembelajaran (kuis, *post-test*, presentasi, penugasan lainnya baik secara individu maupun berkelompok), serta telah mengisi seluruh kuesioner dari Pusbindiklatren dan penyelenggara pelatihan; dan c). Mengikuti seluruh program pelatihan dengan baik dan dinyatakan memenuhi minimum kehadiran yang ditentukan. Dalam hal peserta gagal memenuhi persyaratan dalam poin a dan b, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan sertifikat keikutsertaan dalam pelatihan
4. Pembiayaan Program Pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2023 melalui mekanisme *cost sharing*. Pusbindiklatren menanggung *tuition fee*, tunjangan paket data dan komunikasi, biaya bahan, biaya sewa ruang meeting virtual serta biaya pengawas sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pelatihan Pusbindiklatren Bappenas. Sedangkan Instansi asal peserta menanggung biaya lain yang tidak ditanggung oleh Pusbindiklatren untuk menunjang pelaksanaan pelatihan.
5. Seluruh...

5. Seluruh calon peserta diwajibkan untuk mengunggah Surat Tugas dan Surat Pernyataan Kesediaan (format terlampir), **selambat-lambatnya pada tanggal 19 Juli 2023** melalui <http://sipena.bappenas.go.id>. Informasi panduan penggunaan aplikasi SIPENA dapat diakses melalui tautan <https://link.bappenas.go.id/panduan-aplikasi-sipena>.
6. Berkaitan dengan hal tersebut, mohon Saudara dapat menyampaikan informasi dan menerbitkan Surat Tugas untuk yang bersangkutan. Informasi lebih lanjut perihal pelaksanaan pelatihan, dapat menghubungi Sdr. Naila Sukma Aisyah melalui email [pusbindiklatren@bappenas.go.id](mailto:pusbindiklatren@bappenas.go.id) atau Sdr. Gery (CP MAP UGM) di nomor 08112543288

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan  
dan Pelatihan Perencana,



**Wigny Adiyoso**

Tembusan:

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada;
3. PPK Program PPN X, Kementerian PPN/Bappenas.

Lampiran 1 : Daftar Tujuan  
Nomor : B-13448/P.01/DL.03.01/07/2023  
Tanggal : 18 Juli 2023

#### DAFTAR TUJUAN

1. Badan Pengawasan Obat dan Makanan
2. Kementerian Agama
3. Kementerian Dalam Negeri
4. Kementerian Kesehatan
5. Kementerian Koordinator Kemaritiman
6. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
7. Kementerian Perhubungan
8. Kementerian Sosial
9. Pemerintah Kabupaten Bandung
10. Pemerintah Kabupaten Batang
11. Pemerintah Kabupaten Bogor
12. Pemerintah Kabupaten Grobogan
13. Pemerintah Kabupaten Lumajang
14. Pemerintah Kabupaten Magelang
15. Pemerintah Kabupaten Pekalongan
16. Pemerintah Kabupaten Situbondo
17. Pemerintah Kabupaten Tuban
18. Pemerintah Provinsi Bali

Lampiran 2 : Hak dan Kewajiban Peserta  
Nomor : B-13448/P.01/DL.03.01/07/2023  
Tanggal : 18 Juli 2023

## **HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA**

Kewajiban dan tugas dari peserta pelatihan adalah sebagai berikut:

- a. menyediakan dokumen pendukung pertanggungjawaban pengeluaran (jika dibutuhkan);
- b. menyiapkan alat pendukung untuk mengikuti pelaksanaan pelatihan;
- c. mengikuti seluruh rangkaian agenda pelaksanaan program pelatihan sesuai dengan ketentuan;
- d. mengikuti pelatihan dengan minimal tingkat kehadiran sesuai ketentuan, yakni minimal 90 persen dari jumlah jam pelajaran;
- e. dalam hal berhalangan atau perlu meninggalkan kegiatan pelatihan karena kepentingan pribadi yang mendesak, peserta wajib mendapatkan izin dari pelaksana pelatihan;
- f. menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti semua biaya yang dikeluarkan oleh Pusbindiklatren apabila tidak mengikuti ketentuan yang berlaku selama pelatihan;
- g. mengisi kuesioner pelaksanaan pelatihan yang ditentukan oleh Pusbindiklatren;
- h. menyampaikan/mengunggah surat tugas dan surat kesediaan mengikuti pelatihan (Lampiran 4);

Adapun hak dari peserta pelatihan adalah sebagai berikut:

- a. mendapatkan pelatihan sesuai kurikulum;
- b. mendapatkan bahan pelatihan;
- c. mendapatkan akun dan akses ke dalam Sipena;
- d. mendapat dokumen kelulusan/penyelesaian pelatihan sesuai dengan ketentuan tiap-tiap pelatihan

Lampiran 3 : Hak dan Kewajiban Instansi  
Nomor : B-13448/P.01/DL.03.01/07/2023  
Tanggal : 18 Juli 2023

### **HAK DAN KEWAJIBAN INSTANSI PESERTA PELATIHAN**

Kewajiban dan tugas dari instansi pengirim peserta pelatihan adalah sebagai berikut:

- a. memberikan dukungan kelengkapan dokumen administrasi pelatihan yang disyaratkan Pusbindiklatren dan atau pelaksana pelatihan; serta
- b. memberikan dukungan pembiayaan (*co-funding*) sesuai dengan kebutuhan dengan merujuk kepada Surat Edaran (SE) Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembiayaan Bersama (*cost sharing*) Dalam Penyelenggaraan Program Beasiswa Kementerian PPN/Bappenas.

Adapun hak dari instansi pengirim peserta pelatihan adalah sebagai berikut

- a. mendapatkan peserta yang telah memiliki kompetensi di bidang perencanaan sesuai dengan jenjangnya untuk Pelatihan Fungsional Perencana;
- b. mendapatkan informasi terkait pelaksanaan pelatihan dari Pusbindiklatren dan/atau pelaksana pelatihan.

Lampiran 4 : Surat Kesediaan Peserta  
Nomor : B-13448/P.01/DL.03.01/07/2023  
Tanggal : 18 Juli 2023

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PESERTA PROGRAM PELATIHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....  
NIP :.....  
Pangkat/Golongan :.....  
Jabatan :.....  
Alamat Kantor :.....  
Telp :.....email resmi kantor (\*\*.go.id).....  
No Handphone :.....email pribadi (\*\*\*.com).....  
Pelatihan :.....  
Pelaksana Pelatihan :.....

Menyatakan bahwa:

1. Bersedia untuk mengikuti Beasiswa Program Pelatihan Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2023. Apabila saya **mengundurkan diri setelah batas waktu** yang ditetapkan dalam surat pemanggilan, saya bersedia mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pusbindiklatren dalam pelaksanaan Beasiswa Program Pelatihan Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2023.
2. Bersedia mengikuti seluruh proses pelatihan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan Pusbindiklatren Bappenas dan Pelaksana Pelatihan, termasuk tidak melaksanakan pekerjaan rutin di kantor selama pelatihan berlangsung.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Pimpinan Instansi (Minimal Eselon II)

Yang Berjanji,

(Cap Basah stempel)

(Tanda tangan dan Meterai 10.000)

(.....)  
NIP.

(.....)  
NIP.

Lampiran 5 : Daftar Nama Peserta  
Nomor : B-13448/P.01/DL.03.01/07/2023  
Tanggal : 18 Juli 2023

### DAFTAR PESERTA PELATIHAN FUNGSIONAL PERENCANA AHLI PERTAMA TAHUN 2023

NO	NAMA	NIP	INSTANSI	UNIT KERJA	KOTA/KAB	PROV
1	Achmad Zaenal Muttaqin	198607222020121004	Pemerintah Kabupaten Situbondo	Bappeda	Kabupaten Situbondo	JATIM
2	Aditya Darmawan	199508062019021002	Pemerintah Kabupaten Pekalongan	Bappeda Litbang	Kabupaten Pekalongan	JATENG
3	Alif Firdaus Rison Wastiko	199109192020121008	Pemerintah Kabupaten Grobogan	Bappeda	Kabupaten Grobogan	JATENG
4	Anggi Raka Utama	199406272019031013	Pemerintah Kabupaten Lumajang	Bappeda	Kabupaten Lumajang	JATIM
5	Arsana Rozaktana	198709072019021001	Pemerintah Kabupaten Pekalongan	BAPPEDA LITBANG	Kabupaten Pekalongan	JATENG
6	Aviani Intan Soraya	199402232020122023	Kementerian Dalam Negeri	Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I	Kota Jakarta Selatan	DKI
7	Bernadette Christi Paramitha Santosa	199402052022022002	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Pusbindiklatren	Kota Jakarta Pusat	DKI
8	Dony Wahyudi	198407262019031005	Pemerintah Kabupaten Tuban	Bappeda Litbang Kabupaten Tuban	Kabupaten Tuban	JATIM

 **Perhatian:** Dilarang Memberikan Sesuatu yang Dapat Mengakibatkan KKN



NO	NAMA	NIP	INSTANSI	UNIT KERJA	KOTA/KAB	PROV
9	Dyah Ayu Risky Paramitha	199610032020122008	Pemerintah Kabupaten Magelang	Bappeda Dan Litbangda	Kabupaten Magelang	JATENG
10	Faishal Pradipta Astungkoro	199701312022021001	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Kota Jakarta Pusat	DKI
11	Fitria Haryantiningtyas	198905262019032013	Kementerian Agama	Iain Palangka Raya	Kota Palangka Raya	KALTENG
12	I Wayan Mardiana	199504302020121009	Pemerintah Provinsi Bali	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BALI	Kota Denpasar	BALI
13	Jarot Nugroho	198705192022021001	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappe	Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyara		
14	Kharisma Nugraha Ananda Putra	199401052020121003	Kementerian Kesehatan	RSUP Dr. Sitanala Tangerang	Kota Tangerang	BANTEN
15	M. Arief Budiman	198507212020121004	Pemerintah Kabupaten Bogor	Bappedalitbang	Kabupaten Bogor	JABAR
16	Muhammad Fajar Wibisana	198709072022021001	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan	Kota Jakarta Pusat	DKI
17	Rani Nurfitriani	198901262019032002	Pemerintah Kabupaten Bandung	Bappelitbangda	Kabupaten Bandung	JABAR
18	Reza Susatyo	198708102020121008	Pemerintah Kabupaten Batang	Bapelitbang	Kabupaten Batang	JATENG
19	Rizki Dwi Utari	199601042019012001	Kementerian Koordinator Kemaritiman	Biro Perencanaan	Kota Jakarta Pusat	DKI

 **Perhatian:** Dilarang Memberikan Sesuatu yang Dapat Mengakibatkan KKN





NO	NAMA	NIP	INSTANSI	UNIT KERJA	KOTA/KAB	PROV
20	Sahreza Rahmana Subiantoro	199001232019021003	Kementerian Sosial	Sekretariat Jenderal	Kota Jakarta Pusat	DKI
21	Sarah Ayu Mutiah	199603112020122002	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	Inspektorat II	Kota Jakarta Pusat	DKI
22	Teguh Wahyudi	198607212019031009	Pemerintah Kabupaten Tuban	Bappeda Litbang	Kabupaten Tuban	JATIM
23	Timbul Triyanto	198805082020121002	Kementerian Perhubungan	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Kabupaten Grobogan	JATENG
24	Triana Apita Nugrahaeni	199504222022022001	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Dit. Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	Kota Jakarta Selatan	DKI
25	Whini Athiasari	198710092019032018	Pemerintah Kabupaten Tuban	Bappeda Litbang	Kabupaten Tuban	JATIM

 **Perhatian:** Dilarang Memberikan Sesuatu yang Dapat Mengakibatkan KKN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN